

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Rizki Nurdiyah Ningsih
rizkinurdiyah@gmail.com
Dini Widyawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of human resource competence, utilization of information technology, internal control system, implementation of government accounting standards, and supervision of regional finance to the quality of local government financial reporting information. The research method used in this research is quantitative. The research sample consisted of 21 units of work unit of local government in Sidoarjo regency. The data in this research are the primary data obtained from the questionnaires distributed directly to the respondents who are the chief and staff of the accountin/ financial administration at the Regional Work Unit of Sidoarjo Regency. Sampling technique used is purposive sampling of 82 questionnaires distributed, obtained 77 respondents who can be included in data processing. Analysis of data in this research by using multiple linear regression with the help of SPSS 20 software to process questionnaire data. The results showed that human resource competence, implementation of government accounting standards, and local financial supervision have an influence on the quality of local government financial reporting information. While the utilization of information technology and internal control system does not affect the quality of financial reporting information local government.

Keywords: *quality of information, financial reporting, financial supervision, local government.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, implementasi standar akuntansi pemerintah, dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sampel penelitian terdiri dari 21 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarakan langsung kepada responden yang merupakan kepala dan staf bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dari 82 kuesioner yang dibagikan, diperoleh 77 responden yang dapat dimasukkan dalam pengolahan data. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan *software spss 20* untuk mengolah data kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, implementasi standar akuntansi pemerintah, dan pengawasan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: *kualitas informasi, pelaporan keuangan, pengawasan keuangan, pemerintah daerah.*

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan kemajuan sistem keuangan modern, institusi-institusi pemerintah saat ini harus semakin memperbaiki kualitas kinerja keuangan agar mampu mengikuti perkembangan akuntansi. Adanya tuntutan yang semakin besar masyarakat umum terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010) yakni: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami. Berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk memungkinkan para pemakai laporan keuangan agar dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi tersebut bermanfaat apabila informasi dapat mendukung dalam pengambilan keputusan.

Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor pertama yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Karena, masalahnya apabila terbatasnya pegawai pemerintah yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi, akibatnya kurangnya pemahaman atau penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar sehingga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Oleh sebab itu, agar dapat melaksanakan tanggungjawab dan menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik keterandalan, maka kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting (Karmila *et al.*, 2014).

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor kedua yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Karena kapasitas sumber daya manusia yang memadai belum tentu bisa menghasilkan laporan keuangan yang andal jika tidak didukung dengan teknologi informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi supaya meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik, selain itu dengan menggunakan teknologi informasi salah satunya komputer dalam menghitung dan menyusun laporan keuangan akan lebih cepat, akurat dan konsisten dari pada sistem manual (Indriasari dan Nahartyo, 2008).

Sistem pengendalian intern menjadi faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dalam menyusun laporan keuangan tentu saja sering terjadi kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, oleh sebab itu untuk meyakinkan *stakeholder* maupun publik mengenai keakuratan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah dibutuhkan sistem pengendalian intern yang optimal. Sebuah sistem pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk meniadakan semua peluang terjadinya kesalahan atau penyelewengan, akan tetapi sebuah sistem pengendalian intern yang baik dapat menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang dapat dianggap layak, serta seandainya hal tersebut terjadi maka akan segera dapat diketahui dan diatasi (Purwono, 2007).

Implementasi standar akuntansi pemerintah menjadi faktor keempat yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Indonesia telah menetapkan standar akuntansi pemerintahannya sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dan pemahaman aparatur atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Nurlaila, 2014).

Pengawasan keuangan daerah menjadi faktor kelima yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 tahun 2010 Tentang pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengatakan bahwa pengawasan pemerintah daerah yaitu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan keuangan daerah dapat membantu pemerintah dalam mengontrol kegiatan-kegiatan SKPD dalam menggunakan anggaran dan menyusun laporan keuangan. Pengawasan keuangan ini sangat penting dalam lingkup pemerintahan, agar tidak terjadi hal-hal atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum pemerintahan itu sendiri. Apabila fungsi dari pengawasan ini dijalankan dengan baik oleh pemerintah maka sedikit sekali terjadi kemungkinan akan adanya kecurangan serta kesalahan-kesalahan.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Akuntabilitas publik adalah sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: (1) Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan (2) Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal) (Mardiasmo, 2009).

Dalam pelaksanaan pelaporan keuangan, pemerintah bertindak sebagai agen yang memiliki kewajiban dalam menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hubungan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipalnya (Anggraeni dan Riduwan, 2014).

Teori *New Public Management* (NPM)

NPM berakar dari teori manajemen yang menyatakan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu mengadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan publik (Mardiasmo, 2009).

Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik, yaitu perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Perubahan tersebut diperlukan karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap saat ini tidak lagi memuaskan, terutama karena kekurangannya dalam menyajikan gambaran keuangan yang akurat dan dalam memberikan informasi manajemen yang berguna dan memadai untuk memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja (Cohen *et al.*, 2007).

Kualitas Pelaporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan, sebagai entitas pelayanan publik pemerintah daerah

perlu mempertanggungjawabkan anggaran kinerjanya. Selain sebagai bukti bahwa Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkan kinerjanya, tujuan pelaporan keuangan lainnya adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait (Rachmawati, 2014).

Sementara itu, pelaporan keuangan memiliki peran sebagai berikut: (1) Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, (2) Manajemen, yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat, (3) Transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan, dan (4) Keseimbangan Antargenerasi, yaitu membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Nilai Informasi

Nilai informasi yaitu kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Arfianti, 2011).

Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu: (1) Relevan, yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu, (2) Andal, yaitu keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut, (3) Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya, dan (4) Dapat Dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia yaitu kemampuan yang meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai dari manusia untuk menyelesaikan tugas serta tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Kapasitas sumber daya manusia

dapat terlihat dari tingkat tanggung jawab yang diberikan kepadanya, karena tanggungjawab tersebut diuraikan didalam *job description*. Adanya *job description* akan membantu seseorang melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang tentu memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang akuntansi (Indriasari dan Nahartyo, 2008).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sistem pengendalian intern pemerintah memiliki tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), yaitu SAP diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan yaitu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, selanjutnya membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, karena berguna untuk penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja yang sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja tersebut, untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan (Yosa, 2010).

Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*) (Arfianti, 2011).

Pengembangan Hipotesis

Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan secara efektif dan efisien dalam organisasional, sumber daya manusia mencakup tiga aspek, yaitu pendidikan, pengalaman dan pelatihan. Sumber daya manusia harus baik karena sumber daya manusia yang baik akan menunjukkan kompetensi sumber daya yang baik juga untuk pencapaian kinerja menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Oleh karena itu manusia bertanggung jawab untuk mengelola organisasi, karena sumber daya manusia merupakan elemen penting dan selalu ada dalam organisasi (Hullah *et al.*, 2012).

Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak mempunyai kompetensi dan kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Akibatnya, informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai. Oleh karena itu diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Karena pada organisasi sektor publik menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multi-processing*, Sehingga pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi (Indriasari dan Nahartyo, 2008).

Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatwaktuan. Oleh karena itu diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan Sistem Pengendalian Intern dengan Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan tidak berjalannya pengendalian intern, banyak terjadi penyimpangan dan kebocoran yang ditemukan di dalam laporan keuangan, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi

karakteristik/nilai informasi yaitu keterandalan. Oleh karena itu diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Sistem Pengendalian Intern akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah maupun pusat. Oleh Karena itu, Standar Akuntansi Pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), maka diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan akan dapat dibandingkan dan berguna untuk penilaian kinerja pemerintah. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Andiansyah, 2016). Oleh karena itu diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4 :Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan Pengawasan Keuangan Daerah dengan Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan. Oleh karena itu diajukan hipotesis sebagai berikut:

H5 :Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menganalisis data dengan bentuk angka yang dipusatkan pada pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi/ keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo.

Teknik Sampel Penelitian

Pengambilan sampel (*sampling method*) terhadap responden dilakukan secara *purposive*. *Purposive sampling* yaitu pengambilan sampel digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan pada SKPD.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tanpa melalui perantara) yang menjadi sasaran penelitian. Pengumpulan data akan dilakukan melalui survei kuesioner yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti terhadap bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan janji pada kantor instansi pemerintah tersebut.

Variabel dan Definisi Operational Variabel

Variabel Independen

Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM)

Kompetensi sumber daya manusia yang merupakan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemampuan dari kepala bagian dan staf bagian akuntansi/keuangan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh responden, pemahaman mengenai tugas, dan tanggung jawab terhadap kewajiban.

Pengukuran variabel didalam penelitian ini menggunakan instrumen kuisisioner dengan 6 pertanyaan, menggunakan model skala likert lima poin yang diadaptasi dari (Desmiyawati, 2014) yang telah dikembangkan. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur kompetensi sumber daya manusia dalam penelitian ini adalah: (a) tanggung jawab, (b) pelatihan, (c) pengalaman.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000).

Pengukuran variabel didalam penelitian ini menggunakan instrumen kuisisioner dengan 6 pertanyaan, menggunakan model skala likert lima poin yang diadaptasi dari (Triyanto, 2017) yang telah dikembangkan. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini adalah: (a) penggunaan komputer, (b) jaringan internet.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku (Anggraeni dan Riduwan, 2014).

Pengukuran variabel didalam penelitian ini menggunakan instrumen kuisisioner dengan 7 pertanyaan, menggunakan model skala likert lima poin yang diadaptasi dari (Triyanto, 2017) yang telah dikembangkan. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Menurut PP No. 60 Tahun 2008 terdapat indikator yang digunakan untuk mengukur sistem pengendalian intern dalam penelitian ini adalah: (a) lingkungan pengendalian, (b) penilaian risiko, (c) kegiatan pengendalian, (d) informasi dan komunikasi, (e) pemantauan.

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (ISAP)

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, Standar Akuntansi Pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Pengukuran variabel didalam penelitian ini menggunakan instrumae n kuisione r dengan 5 pertanyaan, menggunakan model skala likert lima poin yang diadaptasi dari (Nurlaila, 2014) yang telah dikembangkan. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penelitian ini adalah: (a) akuntabilitas, (b) manajemen, (c) transparasi, (d) keseimbangan antar generasi, (e) evaluasi kerja.

Pengawasan Keuangan Daerah (PKD)

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010).

Pengukuran variabel didalam penelitian ini menggunakan instrumae n kuisione r dengan 6 pertanyaan, menggunakan model skala likert lima poin yang diadaptasi dari (Desmiyawati, 2014) yang telah dikembangkan. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penelitian ini adalah: (a) Pemerintahan yang bersih, (b) pengaturan dan penetapan, (c) pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, (d) pertanggungjawaban keuangan daerah, (e) pendapatan dan belanja daerah.

Variabel Dependen

Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan (KIPK)

Kualitas informasi yang merupakan variabel dependen adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Pengukuran variabel didalam penelitian ini menggunakan instrumen kuisione r dengan 7 pertanyaan, yang diadaptasi dari (Triyanto, 2017) yang telah dikembangkan. Masing-masing variabel diukur dengan model skala likert lima poin, yaitu Sangat Tidak Setuju mempunyai skor 1, Tidak Setuju mempunyai skor 2, Netral mempunyai skor 3, Setuju mempunyai skor 4, dan Sangat Setuju mempunyai skor 5. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data untuk memecahkan masalah maupun pengujian hipotesis. Program yang digunakan untuk membantu pengolahan data ini adalah menggunakan program aplikasi SPSS versi 20.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Data penelitian, peneliti menyebarkan sebanyak 82 kuesione r yang diantar langsung ke 21 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (SKPD) Kabupaten Sidoarjo

dengan responden sebanyak 82. Kuesioner yang kembali sebanyak 77 dimana semuanya dapat digunakan. Tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) dan dapat digunakan (*respon use*) sebesar 94%, dihitung dari prosentase jumlah kuesioner yang kembali (77 kuesioner) dibagi total yang dikirim (82 kuesioner).

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KIPK	77	3.143	5.000	4.10021	.324533
KSDM	77	3.000	4.833	4.11039	.422860
PTI	77	3.333	5.000	4.23597	.405896
SPI	77	2.571	4.714	3.99627	.407391
ISAP	77	3.600	5.000	4.21558	.349083
PKD	77	3.500	5.000	4.31388	.396398
Valid N (listwise)	77				

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah data penelitian (N) yaitu sebesar 77 data yang digunakan. Variabel kompetensi sumber daya manusia mempunyai nilai minimum sebesar 3,000 dan nilai maximum 4,833. Dan nilai rata-rata kompetensi sumber daya manusia sebesar 4,11039 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,422860.

Variabel pemanfaatan teknologi informasi mempunyai nilai minimum sebesar 3,333 dan nilai maximum 5,000. Dan nilai rata-rata pemanfaatan teknologi informasi sebesar 4,23597 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,405896.

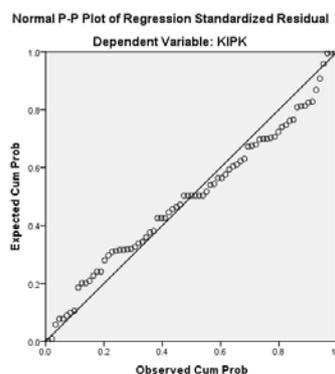
Variabel sistem pengendalian intern mempunyai nilai minimum sebesar 2,571 dan nilai maximum 4,714. Dan nilai rata-rata sistem pengendalian intern sebesar 3,99627 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,407391.

Variabel implementasi standar akuntansi pemerintah mempunyai nilai minimum sebesar 3,600 dan nilai maximum 5,000. Dan nilai rata-rata implementasi standar akuntansi pemerintah 4,21558 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,349083.

Variabel pengawasan keuangan daerah mempunyai nilai minimum sebesar 3,500 dan nilai maximum 5,000. Dan nilai rata-rata pengawasan keuangan daerah 4,31388 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,396398.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Sumber: Data primer diolah.

Gambar 1

Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Berdasarkan gambar 1 tersebut hasil *normal probability plot* dapat dilihat bahwa titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah adalah data yang berdistribusi normal sehingga dapat memenuhi uji normalitas. Dengan pendekatan *Kolmogorov-smirnov test* dengan menggunakan dasar pengembalian keputusan jika hasilnya dengan nilai probabilitas > 0,05 maka dikatakan data normal.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	Standardized Residual
N		77	77
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7	0E-7
	Std. Deviation	.23173843	.96654567
	Absolute	.087	.087
Most Extreme Differences	Positive	.080	.080
	Negative	-.087	-.087
Kolmogorov-Smirnov Z		.764	.764
Asymp. Sig. (2-tailed)		.603	.603

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,764 dengan *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,603 > 0,05. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi normal karena *Kolmogorov-Smirnov* memiliki nilai signifikan 0,603 > 0,05.

Uji Multikolonieritas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

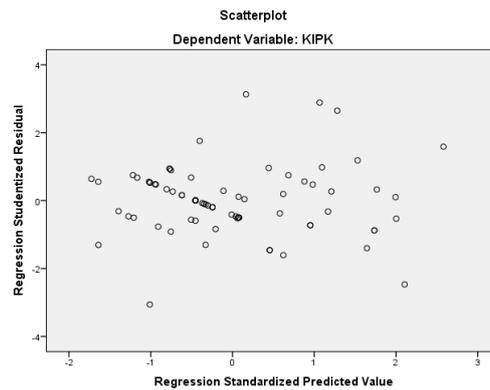
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
KSDM	.494	2.023
PTI	.559	1.788
SPI	.761	1.315
ISAP	.688	1.453
PKD	.910	1.099

a. Dependent Variable: KIPK

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai VIF untuk variabel KSDM sebesar 2,023, PTI sebesar 1,788, SPI sebesar 1,315, ISAP sebesar 1.453, PKD sebesar 1,099. Nilai Tolernce untuk variabel KSDM sebesar 0,494, PTI sebesar 0,559, SPI sebesar 0,761, ISAP sebesar 0,688, PKD sebesar 0,910. Kesimpulan dari pengujian tersebut adalah nilai VIF untuk variabel KSDM, PTI, SPI, ISAP, PKD tidak lebih atau < 10. Nilai Tolerance untuk variabel KSDM, PTI, SPI, ISAP, PKD tidak kurang atau > 0,1. Dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian ini tidak terjadi multikolonieritas karena model regresi baik, tidak terjadi korelasi antara variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data primer diolah.

Gambar 2

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa terlihat bahwa titik-titik tersebut menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu, serta menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas atau bebas dari heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak dipakai untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.413	.397		3.564	.001
KSDM	.259	.095	.338	2.729	.008
PTI	.067	.093	.084	.720	.474
SPI	.002	.011	.017	.171	.865
ISAP	.305	.098	.328	3.126	.003
PKD	.011	.004	.236	2.583	.012

a. Dependent Variable: KIPK

Sumber: Data primer diolah.

$$\text{KIPK} = 1,413 + 0,259\text{KSDM} + 0,067\text{PTI} + 0,002\text{SPI} + 0,305\text{ISAP} + 0,011\text{PKD} + e$$

Persamaan regresi linear berganda pada tabel 4 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai konstanta adalah 1,413. Berarti apabila variabel independen diasumsikan konstan atau bernilai 0 maka kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah bernilai 1,413.

Nilai koefisien regresi Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) adalah 0,259 berarti menunjukkan bahwa arah hubungan positif (searah) antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Karena tanda positif menunjukkan pengaruh kompetensi sumber daya manusia searah terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu apabila semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka akan meningkat pula kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,259.

Nilai koefisien regresi Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) adalah 0,067 berarti menunjukkan bahwa arah hubungan positif (searah) antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Karena tanda positif menunjukkan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi searah terhadap kualitas informasi

pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu apabila semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka akan meningkat pula kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,067.

Nilai koefisien regresi Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah 0,002 berarti menunjukkan bahwa arah hubungan positif (searah) antara sistem pengendalian intern dengan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Karena tanda positif menunjukkan pengaruh sistem pengendalian intern searah terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu apabila semakin baik sistem pengendalian intern maka akan meningkat pula kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,002.

Nilai koefisien regresi implementasi standar akuntansi pemerintah (ISPI) adalah 0,305 berarti menunjukkan bahwa arah hubungan positif (searah) antara implementasi standar akuntansi pemerintah dengan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Karena tanda positif menunjukkan pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah searah terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu apabila semakin baik implementasi standar akuntansi pemerintah maka akan meningkat kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,305.

Nilai koefisien regresi Pengawasan Keuangan Daerah (PKD) adalah 0,011 berarti menunjukkan bahwa arah hubungan positif (searah) antara pengawasan keuangan daerah dengan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Karena tanda positif menunjukkan pengaruh pengawasan keuangan daerah searah terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu apabila semakin baik pengawasan keuangan daerah maka akan meningkat pula kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,011.

Pengujian Hipotesis
Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 5
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.923	5	.785	13.649	.000 ^b
	Residual	4.081	71	.057		
	Total	8.004	76			

a. Dependent Variable: KIPK

b. Predictors: (Constant), PKD, SPI, PTL, ISAP, KSDM

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 13,649 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini adalah cocok atau *fit*.

Koefisien Determinasi (Uji R²)

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.700 ^a	.490	.454	.239759

a. Predictors: (Constant), PKD, SPI, PTL, ISAP, KSDM

b. Dependent Variable: KIPK

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa besarnya nilai *Adjusted R Square* adalah 0,454 atau 45,4%. Hal ini berarti bahwa variasi besarnya kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah bisa dijelaskan oleh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, implementasi standar akuntansi pemerintah, dan pengawasan keuangan daerah. Dan sisanya sebesar 54,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikuti sertakan dalam model, misalkan yaitu komitmen organisasi, kualitas aparatur daerah, asimetri informasi, kejelasan tujuan, penerapan sistem manajemen keuangan daerah.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 7
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	1.413	.397		
KSDM	.259	.095	.338	2.729	.008
1 PTI	.067	.093	.084	.720	.474
SPI	.002	.011	.017	.171	.865
ISAP	.305	.098	.328	3.126	.003
PKD	.011	.004	.236	2.583	.012

a. Dependent Variable: KIPK

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji t) pada tabel 7 adalah sebagai berikut:

Kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,259. Sehingga menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, maka dapat diputuskan H1 diterima. Hal ini mengidentifikasi bahwa apabila semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik pula kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Variabel kompetensi sumber daya manusia menunjukkan t hitung sebesar 2,729 dengan nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$. Dapat disimpulkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,067. Sehingga menunjukkan arah hubungan negatif (berlawanan arah) antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, maka dapat diputuskan H2 ditolak. Hal ini mengidentifikasi bahwa apabila semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka belum tentu akan meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Variabel pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan t hitung sebesar 0,720 dengan nilai signifikansi sebesar $0,474 > 0,05$. Dapat disimpulkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem pengendalian intern memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,002. Sehingga menunjukkan arah hubungan negatif (berlawanan arah) antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, maka dapat diputuskan H3 ditolak. Hal ini mengidentifikasi bahwa apabila semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka belum tentu akan meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Variabel pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan t hitung sebesar 0,171 dengan nilai signifikansi sebesar $0,865 > 0,05$. Dapat disimpulkan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Implementasi standar akuntansi pemerintah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,305. Sehingga menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara implementasi standar akuntansi pemerintah dengan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, maka dapat diputuskan H4 diterima. Hal ini mengidentifikasi bahwa apabila semakin baik implementasi standar akuntansi pemerintah maka semakin baik pula kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Variabel implementasi standar akuntansi pemerintah menunjukkan t hitung sebesar 3,126 dengan nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$. Dapat disimpulkan implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengawasan keuangan daerah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,011. Sehingga menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara pengawasan keuangan daerah dengan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, maka dapat diputuskan H5 diterima. Hal ini mengidentifikasi bahwa apabila semakin pengawasan keuangan daerah maka semakin baik pula kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Variabel pengawasan keuangan daerah menunjukkan t hitung sebesar 2,583 dengan nilai signifikansi sebesar $0,012 < 0,05$. Dapat disimpulkan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Faktor penting demi terciptanya kualitas informasi pelaporan keuangan yang berkualitas adalah sumber daya manusia. Keberhasilan suatu organisasi bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimiliki, tetapi melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, (2) Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kemudahan dalam menggunakan teknologi informasi tidak selalu memberikan hasil yang positif. Karena, penggunaan teknologi informasi hanya sekedar alat bantu dan hiburan diwaktu kosong, sehingga penggunaan teknologi informasi tidak secara maksimal. Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan skill staf dengan melakukan pelatihan teknologi informasi secara berkesinambungan. Kondisi ini juga harus didukung dengan kemudahan untuk memperoleh teknologi informasi dengan harga yang terjangkau dan kemampuan teknologi yang baik, (3) Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan tidak berjalannya pengendalian intern, banyak terjadi penyimpangan dan kebocoran yang ditemukan di dalam laporan keuangan, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yaitu keterandalan. Oleh karena itu, dengan melihat temuan BPK tentang kelemahan sistem pengendalian intern tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, (4) Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Karena standar akuntansi pemerintah merupakan kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan

pemerintah di Indonesia. Dengan demikian informasi keuangan pemerintah daerah menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas, dan (5) Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengawasan pada dasarnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atau penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Saran

Dengan adanya keterbatasan waktu dalam penelitian ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan hasil penelitian ini. Saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mengembangkan penelitian ini mempertimbangkan untuk menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan daerah, seperti komitmen organisasi, kualitas aparatur daerah, penerapan sistem manajemen keuangan daerah, (2) Supaya dapat melengkapi metode survei penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung sehingga peneliti mengetahui alasan yang menjadi latar belakang jawaban setiap responden, karena kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner serta sikap kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada, (3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas daerah penelitian dan memperbanyak jumlah responden, dan (4) Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada rendahnya kualitas informasi pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah sebaiknya melakukan pengajian ulang mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan pelaporan keuangan agar kualitas informasi pelaporan keuangan dari pemerintah untuk kepentingan publik dapat terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiansyah, D. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pada Skpd Di Kota Bandar Lampung). *Skripsi*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Anggraeni, D. T. dan A. Riduwan. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. 3(3): 1-16.
- Arfianti, D. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Cohen, S., Kaimenaki, dan Zorgios. 2007. Assessing IT as a Key Success Factor for Accrual Accounting Implementation in Greek Municipalities. *Financial Accountability and Management*. 23(1): 91-111.
- Desmiyawati. 2014. Faktor faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Study Empiris Pada SKPD Pemda Riau). *Jurnal Akuntansi*. 2(2): 163-178.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hullah, A. R., S. Pangemanan, S. Tangkuman, dan N. Budiarmo. 2012. Pengaruh Sumber DayaManusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*. 3(2).

- Indriasari, D. dan E. Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *Simposium Nasional Akuntansi XI*, Pontianak.
- Karmila, A. R. Tanjung, dan E. Darlis. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Riau). *Jurnal Sorot*. 9(1): 1-121.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat. Yogyakarta.
- Nurlaila. 2014. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Purwono, E. 2007. *Aspek-aspek EDP Audit Pengendalian Internal pada Komputerisasi*. Andi. Yogyakarta.
- Rachmawati, A. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali). *Naskah Publikasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Triyanto, H. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Peran Inspektorat Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Kuesioner Penelitian*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi dan Penyusunan laporan keuangan Pemerintahan.
- Wilkinson, W. J., M. J. Cerullo, V. Raval, dan B. W. Wing. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc. USA.
- Yosa. 2010. *Pengertian Pengawasan*. <http://www.itjenkemdagri.go.id>. 03 Oktober 2017 (13:11).